



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2018/Periodik - 2017)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
UNIT KERJA : BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
SUB UNIT KERJA : BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ENNY NURBANINGSIH
2. Jabatan : KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
3. NHK : 190217

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.305.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 245 m²/300 m² di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah Seluas 556 m² di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m²/65 m² di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 442.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA CAMRY SEDAN Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
3. MOBIL, HONDA CR-V JEEP Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ---****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ---****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 1.052.176.282****F. HARTA LAINNYA** **Rp. ---****Sub Total** **Rp. 2.799.176.282****III. HUTANG** **Rp. ---****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** **Rp. 2.799.176.282**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **13 September 2018**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.